



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE



LKjIP

TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPAT EN BONE



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020

Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RENSTRA Tahun 2018–2023. LKjIP Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone. Komitmen dalam penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone. Adapun



aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 8 Indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan 2 indikator kinerja yang menghampiri target dan 1 indikator kinerja yang masih jauh dari target. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP : 19681130 199403 2 007

Pangkat : Pembina Utama Muda



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM	3
1.3.2 Struktur Organisasi	12
1.3.3 Komposisi SDM Organisasi	14
1.4 Isu Strategis	15
1.5 Inovasi Pelayanan Publik	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis	18
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	18
2.1.2 Program untuk Pencapaian Sasaran	20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	30
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	31
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja	32
3.3 Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	61



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Data Pejabat Struktural	14
Tabel 1.2	Data SDM	15
Tabel 2.1	Tujuan, sasaran dan indikator kinerja	19
Tabel 2.2	Program untuk pencapaian sasaran tahun 2020	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2020	21
Tabel 2.4	IKU Dinas koperasi	22
Tabel 2.5	Rencana Belanja Dinas Koperasi dan UKM	23
Tabel 2.6	Alokasi Per Sasaran tahun 2020	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2	kategori Pencapaian Indikator Sasaran	28
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	29
Tabel 3.4	Capaian Indikator Utama	31
Tabel 3.5	Persentase kategori Pencapaian Indikator Sasaran 1	32
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian indikator kinerja sasaran 1	34
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dengan target renstras sasaran 1	35
Tabel 3.8	Efisiensi pengguna sumber daya sasaran 1	38
Tabel 3.9	program dan kegiatan sasaran 1	38
Tabel 3.10	Capaian indikator kinerja sasaran 2	43
Tabel 3.11	Perkembangan Capaian indikator kinerja sasaran 2	44
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi dengan target renstras sasaran 2	45
Tabel 3.13	Efisiensi pengguna sumber daya sasaran 2	48
Tabel 3.14	program dan kegiatan sasaran 2	48
Tabel 3.15	Capaian indikator kinerja sasaran 3	52
Tabel 3.16	Nilai Hasil Evaluasi	53
Tabel 3.17	Perkembangan Capaian indikator kinerja sasaran 3	53
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi dengan target renstras sasaran 3	54
Tabel 3.19	Efisiensi pengguna sumber daya sasaran 3	55
Tabel 3.20	program dan kegiatan sasaran 3	56



Tabel 3.21 perubahan IKU tahun 2020

63

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi	13
Gambar 2 Geleri Padaidi	17
Gambar 3 Dokumentasi kegiatan Pembinaan Koperasi Tahun 2020	42
Gambar 4 Dokumentasi kegiatan Pembinaan UKM Tahun 2020	51
Gambar 5 Dokumentasi kegiatan Penghargaan Koperasi berprestasi	62

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	67
Lampiran 2 Undangan Koperasi Berprestasi	69
Lampiran 3 Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan UKM

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja

setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Disinilah esensidari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud Dan Tujuan

LKjIP Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi Dan Ukm

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan UKM diatur dalam Peraturan Bupati no. 77 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone,

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. pelaksanaan program dan anggaran.
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas :

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyerat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.

- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian.
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya.
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset.
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2 Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan

Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan.
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja.

- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan.
- f. Membuat rencana kerja tahunan.
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas.
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan.
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala.
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan.
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3) Kepala Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan

Tugas :

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan pelaksanaan, pelatihan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelembagaan Koperasi.

Fungsi :

- a. Pengorganisasian pelaksanaan Pengawasan koperasi
- b. Pengorganisasian perluasan akses perizinan bagi koperasi.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- d. Pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- e. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- f. Pelaksanaan perlindungan koperasi.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

3.1 Kepala Seksi Kelembagaan Dan Perizinan

Tugas :

Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Menganalisis dokumen izin pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi.
- e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit usaha simpan pinjam.
- f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

- g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

3.2 Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan

Tugas :

Kepala Seksi Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.
- b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.
- c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bidang Kelembagaan dan Pengawasn terkait tugasny

3.3 Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan

Tugas :

- a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yng sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
- b. Melaksanakan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- c. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- d. Memeriksa dan mengawasi kelembagaan dan usaha koperasi.
- e. Memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

4) Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi

Tugas :

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi.

Fungsi :

- a. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- b. Pengorganisasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- e. Pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- g. Pelaksanaan perlindungan koperasi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

4.1 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Tugas :

- a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
- c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat lokal dan nasional.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

4.2 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi

Tugas :

- a. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- b. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya

4.3 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sdm Koperasi

Tugas :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

5) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Tugas :

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Fungsi :

- a) Pengordinasian pemberdayaan dan Perlindungan usaha mikro.
- b) Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- c) Pengordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.

- d) Pengordinasian pendataan izin usaha mikro kecil menengah (IUMK)
- e) Pengordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- f) Pengordinasian penengembangan kewirausahaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

5.1 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro

Tugas :

- a. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- b. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK)
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

5.2 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro

Tugas :

- a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
- b. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

5.3 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Tugas :

- a. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
- b. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan
- c. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan.

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

1.3.2 Struktur Organisasi

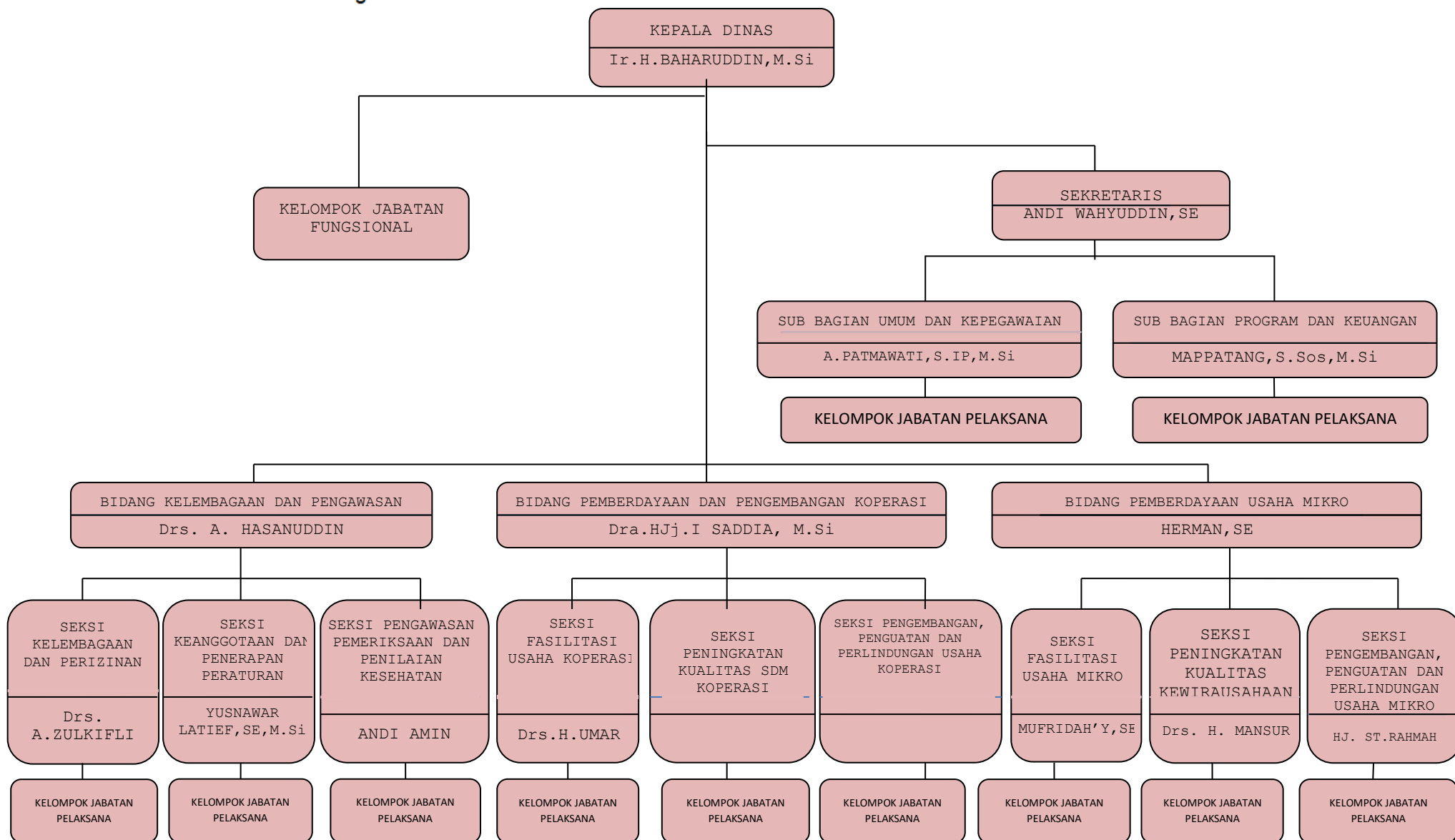
struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone terdiri atas:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris dengan 2 sub bagian
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan
 - Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- c) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan 3 seksi
 - Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan
 - Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
 - Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
- d) Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dengan 3 seksi
 - Kepala Seksi Fasilitas Usaha Koperasi
 - Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
 - Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi
- e) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan 3 seksi
 - Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro
 - Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
 - Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro.



Dinas Koperasi dan UKM memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi





1.3.3 Komposisi SDM Organisasi

Susunan Kepegawaian dan jumlah personil di Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pejabat Struktural Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2020

Unit Kerja	Eselon			PNS		
	IV	III	II	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala DINAS				-	-	1
- Sekretaris	1	1	1			1
▮ Kasubbag Umum dan Kepegawaian						1
▮ Kasubbag Program Dan Keuangan	1					1
- Bidang Kelembagaan dan Pengawasan		1	-	-	-	1
▮ Kepala Seksi Kelembagaan Dan Perizinan	1	-	-	-	-	1
▮ Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan	1	-	-	-	1	-
▮ Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Peneilaian Kesehatan		1	-	-	-	1
- Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi		-	-	-	-	1
▮ Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	1		-	-	-	-
▮ Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi		-	-	-	-	-
▮ Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha		1	-	-	-	1
- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	-		-	-	-	-
▮ Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	1	-			1	
▮ Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	1	-	-	-	-	1
▮ Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro	1	-	-	-	1	
Jumlah	9	4	1	-	3	11



Tabel 1.2
Data PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Penyuluh Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2020

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tk.I (IV/b)	S1	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Tk.I (IV/b) s/d Pembina (IV/a)	S1 / S2	3	
4	Ka. Sub Bag / Bid	Pembina (IV/a) s/d Penata Tk.I(III/d)	SMA / S1 / S2	9	
5	Sta f	Pengatur (II/c) s/d Penata Tk.I (III/d)	SMA / S1 / S2	8	
		- Tenaga Kontrak	SMA / S1	17	
		- Tenaga Penyuluh Koperasi (Kontrak)	S1/S2	8	
		J U M L A H		49	

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

1. Menjadikan Koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.
2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro terhadap persaingan ekonomi global
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil
5. Meningkatkan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.



1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

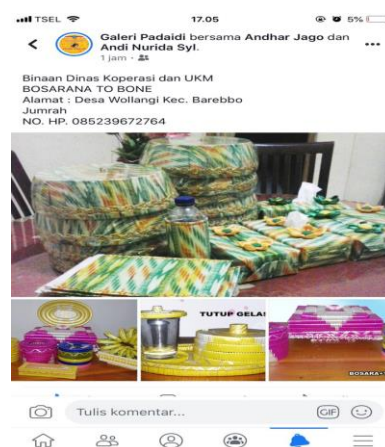
Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Online Market atau Online Promosi melalui media Facebook yang kami sebut “ **Klik GaleriPadaldi**” sebagaimana salah satu Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM adalah membantu memfasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha Koperasi dan UKM sehingga melalui “Klik Galeri Padaldi” diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses produk KUKM dan juga memudahkan KUKM dalam pemasaran.



Gambar 2 Geleri Padaidi

KLIK GALERI PADAIDI

<http://www.facebook.com/galeri.padaidi>





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai perwujudan dari Misi ke-2 **yaitu mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.**

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan masa depan yang akan mencerminkan kebutuhan yang fundamental dalam bidang koperasi dan UKM, maka visi koperasi dan UKM dilaksanakan dengan merefleksikan kebutuhan kedalam dinamika pembangunan koperasi dan UKM dari berbagai aspek, dengan tetap mengacu pada visi-misi Kabupaten Bone Tahun 2020-2023, yaitu Misi Ke-2 **Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.** Pelaksanaan program pembangunan koperasi dan UKM yang diimplementasikan kedalam program jangka menengah/program tahunan sesuai visi – misi koperasi dan UKM, dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan.

Rumusan Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro





2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan dan sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran serta indikator kinerja Dinas Koperasi Dan UKM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mengembangkan Kemandirian Ekonomi melalui Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah Koperasi berprestasi	Unit	2	3
		Persentase Koperasi sehat	Persen	41,9 (62/148)	70
		Persentase Koperasi aktif	Persen	30,39 (148 /487)	40,70
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Rupiah (Milyar)	240,639 M	260,566
	Meningkatnya Pertumbuhan Kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persen	8,96	13,28
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99,5	99,86
		Pertumbuhan Volume Usaha Mikro	Rupiah (Milyar)	678,834 M	698,82
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	C	A

2. 1.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan Bidang Kopetasi dan Usaha Mikro	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur
	Program peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan Umum

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Koperasi dan UKM telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi berprestasi	3
	Persentase Koperasi sehat	64
	Persentase Koperasi aktif	34,50
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	248,71
Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	11,76
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,86
	Pertumbuhan Volume Usaha Mikro	695,22
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	B

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Koperasi dan UKM telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.4 IKU Dinas Koperasi dan UKM

No	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Persentase Koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat}}{\text{Jumlah seluruh koperasi se kab. Bone}} \times 100$ <p>Tipe penghitungan : Kumulatif</p>
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil Tn - Tb}}{\text{Usaha kecil Tb}} \times 100$ <p>Tipe penghitungan : Kumulatif</p>
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah Seluruh Usaha Mikro Dan Kecil}} \times 100$ <p>Tipe penghitungan : Kumulatif</p>

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19, presiden memerintahkan untuk melakukan **Refocusing Anggaran** disemua instansi pemerintahan, termasuk Anggaran Dinas Koperasi dan UKM mengalami Refocusing, beberapa kegiatan mengalami perubahan anggaran yang signifikan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3.493.435.068,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Rencana Belanja Dinas Koperasi Dan UKM TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.319.685.068	52,38
2	Belanja Langsung	1.173.750.000	47,61
Jumlah		3.493.435.068	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	%
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi berprestasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan, Pengawasan Dan penghargaan Koperasi Berprestasi	43.340.000	3,69
	Persentase Koperasi sehat		Sosialisasi prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	32.490.000	2,77
			Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	22.250.000	1,90
			Pembinaan, Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	22.800.000	1,94



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	%
	Persentase Koperasi aktif		Koordinasi pelaksanaan Kebijakan dan program pembangunan Koperasi	61.350.000	5,23
			Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	25.280.000	2,15
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan, Pemantauan Administrasi Koperasi pengelola Pasar Tradisional	10.800.000	0,92
			Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	17.000.000	1,45
			Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi pengurus , oengelola KSP/USP	44.500.000	3,79
			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	50.197.300	4,28
Meningkatnya Pertumbuhan Kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro, kecil Dan Menengah	24.500.000	2,09
			Pendataan UMKM	65.800.000	5,61
	Persentase Usaha Mikro dan kecil	Program Pengembangan Sistem Pendukung	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro kecil dan Menengah	60.525.000	5,16



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	%
		Usaha Bagi UKM	Pengembangan Kebijakan dan Program peningkatan Ekonomi Lokal	0	0,00
	Pertumbuha n Volume Usaha Mikro	Program pengemban gan Kewirausaha an Dan keunggulan Kompetitif UKM	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	45.865.000	3,9
Meningkat nya akuntabilit as Kinerja Urisan Pemerinta han Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000	7,50
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.000.000	0,26
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5.000.000	0,42
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah dan Luar daerah	157.833.000	13,45
			Pelaksanaan administrasi perkantoran	69.925.000	5,95
			Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	99.076.800	8,44
		Program peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0,00
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27.000.000	2,30
			Pengadaan Mebeleur	0	0,00



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	10.293.500	0,87
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	44.857.400	3,82
		Program Peningkatan Kapasitas Dan Sumber daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-Undangan	25.550.000	2,18
		Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.767.000	3,90
		Program Penunjang pemerintahan Umum	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	40.250.000	3,43
			Pengelolaan Webiste Perangkat Dearah	30.500.000	2,60

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 1.173.750.000 dengan prosentase terbesar anggaran untuk Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urisan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebesar 55,12 % atau Rp. 647.052.700,- Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Meningkatnya koperasi yang berkualitas dengan besaran Rp. 330.007.300,- atau 28,11% Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya Pertumbuhan Kewirausahaan serta Kualitas Skala Usaha Mikro sebesar Rp. 196.690.000 atau 16,75 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % \leq	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Secara umum Dinas Koperasi Dan UKM telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2013–2020. Dalam Renstra terdapat 3 sasaran dengan 8 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 4 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 3 indikator kinerja dan Sasaran 3 terdapat 1 indikator kinerja.

Dari 3 sasaran dengan 8 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1 Meningkatnya koperasi yang berkualitas			
1.	Sangat Tinggi	3	100 / 100 / 99,16
2.	Tinggi		
3.	Sedang		
4.	Rendah		
5.	Sangat Rendah	1	38,17
	Jumlah	4	
Sasaran 2 Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan dan kualitas skala usaha mikro			
1.	Sangat Tinggi	3	123,87 / 100 / 99,73
2.	Tinggi		
3.	Sedang		
4.	Rendah		
5.	Sangat Rendah		
	Jumlah	3	
Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro			
1.	Sangat Tinggi	1	100
2.	Tinggi		
3.	Sedang		
4.	Rendah		
5.	Sangat Rendah		
	Jumlah	1	

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran dengan 8 indikator kinerja, diketahui bahwa 7 indikator sasaran dengan Kategori sangat Tinggi dan 1 Indikator sasaran dengan kategori Sangat Kurang

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi sehat(%)	64	24,43 (43/176)	38,17
		Persentase koperasi aktif (%)	34,50	34,50 (176/510)	100
		Jumlah Koperasi berprestasi	3	3	100
		Pertumbuhan Volume Usaha koperasi (Milyar)	248,71	246,63	99,16

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (%)	11,76	11,76 (380-340)/340	100
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,86	99,60 (16.307+380) /16.754	99,73
		Pertumbuhan Volume Usaha Mikro (Milyar)	695,22	861,21	123,87
3.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B (69,82)	100

3.1.2 Capaian Iku

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan dapat diukur. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditetapkan di awal tahun pencapaian masing-masing indikator kinerja utama dapat dilihat berdasarkan tabel capaian Kinerja Utama dibawah :

Tabel 3.4. Capaian Indikator Utama Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi sehat (%)	24,43 (43/176)
2.	Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (%)	11,76 (380-340)/340
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,60 (16.307+380)/16.754

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD instansi Tahun 2018-2023 sebanyak 3 (dua puluh) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 2 indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria **“Sangat Tinggi”**. dan 1 Indikator capaian kinerja dibawa 50% atau kriteria **“Sangat Rendah”**.

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi Dan UKM tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Dinas Koperasi dan UKM dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran 1: Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1****Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Koperasi sehat(%)	64	24,43 (43/176)	38,17
b.	Persentase koperasi aktif (%)	34,50	34,50 (176/510)	100
c.	Jumlah Koperasi berprestasi	3	3	100
d.	Pertumbuhan Volume Usaha koperasi (Milyar)	248,71	246,63	99,16

1. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator *kinerja utama 1* yaitu **Persentase Koperasi sehat**, dengan capaian ***kurang dari target*** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 22,43 %, dari target 64 % dengan persentase 38,17%. Capaian ini dikategorikan **Sangat Rendah**.

Pada tahun 2020 Jumlah koperasi sehat 43 unit dan jumlah keseluruhan koperasi aktif sebanyak 176 unit koperasi. Persentase koperasi sehat diperoleh dari :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi aktif}} \times 100 \% \\ &= \frac{43}{176} \times 100 \% \\ &= 38,17 \end{aligned}$$

2. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu *Persentase Koperasi aktif*, dengan capaian **sesuai dengan target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 34,50 %, dari target 34,50 %, dengan persentase 100 %. Capaian ini dikategorikan **“Sangat Tinggi”**

Pada tahun 2020 Jumlah koperasi aktif 176 unit dan jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 510 unit koperasi. Persentase koperasi sehat diperoleh dari :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi}} \times 100 \% \\ &= \frac{176}{510} \times 100 \% \\ &= 100 \end{aligned}$$

3. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu Jumlah koperasi berprestasi, dengan capaian **sesuai dengan target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 3 unit, dari target 3 unit dengan persentase 100 %. Capaian ini dikategorikan **“Sangat Tinggi”**
4. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 4 yaitu Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, dengan capaian **kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 248,63 M, dari target 248,71 dengan persentase 99,16 % Capaian ini dikategorikan **“Sangat Tinggi”**

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1**Tabel 3.6. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.**

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Persentase koperasi sehat (%)	41,9 (62/148)	43,5 (67/154)	24,43 (43/176)
b.	Persentase koperasi aktif (%)	30,39 (148/487)	31,4 (154/491)	34,50 (176/510)
c.	<i>Jumlah Koperasi berprestasi</i>	2	2	3
d.	Pertumbuhan volume usaha koperasi (Milyar)	240,639 M	236,647 M	246,63 M

1. Realisasi Indikator Kinerja koperasi sehat pada tahun 2020 mencapai 22,43 %, dari target 64 %, mengalami penurunan dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 28%
2. Realisasi Indikator Kinerja Persentase koperasi aktif pada tahun 2020 mencapai 34,50 %. dari target 34,50 %. mengalami kenaikan dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 4,7 %
3. Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Koperasi berprestasi pada tahun 2020 mencapai 3 koperasi. dari target 3 koperasi, mengalami kenaikan dari tahun 2019 (tahun sebelumnya)
4. Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan volume usaha koperasi pada tahun 2020 mencapai Rp. 236,647 M dari target Rp.244,503 M, mengalami kenaikan dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 10 %

c) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target akhir Renstra. Sasaran 1

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target akhir renstra
a.	Persentase koperasi sehat (%)	24,43 (43/176)	70
b	Persentase koperasi aktif (%)	34,50 (176/510)	40,70
c	Jumlah Koperasi berprestasi (Unit)	3	3
d.	Pertumbuhan volume usaha koperasi (Milyar)	246,630 M	260,566 M

1. Realisasi Indikator Kinerja koperasi sehat pada tahun 2020 mencapai 24,43 % dan target akhir renstra yang diharapkan adalah 70 %, memerlukan peningkatan kinerja sebesar 34,9 %
2. Realisasi Indikator Kinerja Persentase koperasi aktif pada tahun 2020 mencapai 34,50 %. Dan target akhir renstra adalah 40,70 %, memerlukan peningkatan kinerja sebesar 8,4 %
3. Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Koperasi berprestasi pada tahun 2020 mencapai 3 koperasi dan target akhir renstra yang diharapkan sebanyak 3 kopersisudah memenuhi target kinerja
4. Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan volume usaha koperasi pada tahun 2020 mencapai Rp. 246,630 M dan target akhir renstra adalah Rp. 260,566 M, memerlukan peningkatan kinerja sebesar 9,4 %



d) Analisis *Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja*

1. Persentase Koperasi Sehat

Koperasi sehat dapat terlihat dari jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT karena dapat menyajikan Laporan pertanggung Jawaban yang mana menjadi dasar untuk dilakukan penilaian kesehatan Koperasi, Berdasarkan Permenkop Nomor : 20/Per/M.Kukm/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi terdapat beberapa indikasi penilaian kesehatan koperasi diantaranya: Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jatidiri koperas. Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi. Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu: 1. Sehat; 2. Cukup sehat; 3. Kurang sehat; 4. Tidak sehat; atau; 5. Sangat tidak sehat.

Penyebab tidak tercapainya target persentase Koperasi sehat tidak terlepas dari pengaruh adanya wabah/pandemi covid-19 yang melanda semua sektor termasuk Koperasi, akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini membuat penuruna tingkat pelaksanaan RAT, di tahun 2019 tercatat 64 Koperasi melaksanakan RAT mengalami penurunan di tahun 2020 hanya tercatat 43 Koperasi yang melaksanakan RAT.

Dengan adanya upaya dari pemerintah menekan penyebaran pandemi Covid-19 melalui Vaksin terhadap seluruh masyarakat, himbauan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sehingga diharapkan pelaksanaan RAT tahun 2021 kembali meningkat sesuai target.

2. Persentasi Koperasi Aktif

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi RI No. 23 Tahun 2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi RI No. 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah maka dalam pemberian acuan dan pemahaman yang sama mensinergikan kegiatan pengumpulan data koperasi dan UKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada kementerian dan SKPD yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan yang disebut ODS (Online Data System) dimana indikator koperasi aktif yang dulunya hanya didasarkan pada pelaksanaan kegiatan unit usaha (aktif secara usaha) sekarang indikator koperasi aktif meningkat, yaitu koperasi yang telah 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (aktif secara kelembagaan dan usaha).

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah koperasi aktif di tahun 2018 yaitu 148 koperasi atau 30,39 %. Meskipun demikian jumlah koperasi aktif dapat ditingkatkan kembali di tahun 2020 sebesar 176 koperasi atau 34,50 persen. Oleh karena itu realisasi indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2020 yaitu 34,50 % (sesuai dengan target) capaian RPJMD yang diharapkan yaitu 34,50 % .

3. Jumlah Koperasi Berprestasi

Koperasi berprestasi diperlombakan tingkat Provinsi, dan melalui beberapa tahapan penilaian serta bersain dengan Koperasi koperasi unggul dari Kab./Kota se Sulawesi selatan.

Dari tabel 3.6 perkembangan capaian indikator kinerja , sasaran 1. Terlihat peningkatan dari persentasi Koperasi berprestasi dari tahun sebelumnya 2019 yang terdiri dari 2 Koperasi menjadi 3 Koperasi di tahun 2020, sesuai dengan target capaian RPJMD yang diharapkan yakni 3 Koperasi.

4. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Berdasarkan Tabel 3.6 capaian Indikator sasaran 1 yaitu Pertumbuhan volume usaha koperasi tahun 2020 adalah 99,16 %.mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target tahun 2020 ini di karenakan adanya dampak dari pandemi Covid 19 mengakibatkan Koperasi yang selama ini mengadakan RAT harus menunda pelaksanaannya karna larangan kegiatan berkumpul untuk mencegah penularan Covid-19 sehingga mempengaruhi Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, selain itu volume usaha juga tidak dinamis karena tergantung tingkat partisipasi anggota dalam koperasi.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang dialokasikan TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 330.007.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 328.620.000 atau 99,57

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	330.007.300	32.8620.000	99,57

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Jumlah Koperasi Berprestasi	Pembinaan, Pengawasan Dan penghargaan Koperasi Berprestasi	43.340.000	43.340.000	100



2.	Persentase Koperasi Sehat	Sosialisasi prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	32.490.000	31.490.000	97
		Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	22.250.000	22.250.000	100
		Pembinaan, Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	22.800.000	22.800.000	100
3.	Persentase Koperasi Aktif	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan dan program pembangunan Koperasi	61.350.000	61.350.000	100
		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	25.280.000	25.280.000	100
4.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pembinaan, Pemantauan Administrasi Koperasi pengelola Pasar Tradisional	10.800.000	10.800.000	100
		Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	17.000.000	17.000.000	100
		Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi pengurus , oengelola KSP/USP	44.500.000	44.414.000	100
		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	50.197.300	49.896.000	99



Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM tahun 2020 di atas yaitu Jumlah Koperasi sehat dengan capaian 38,17% Persentase Koperasi aktif dengan capaian sebesar 100 %, Persentase Koperasi berprestasi dengan capaian 100 % dan Pertumbuhan volume usaha koperasi dengan capaian 99,16%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 330.007.300,- realisasi sebesar Rp. 328.620.000,- atau 99,57% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi dengan capaian terlaksananya kegiatan penyuluhan Perkoperasian bagi masyarakat dan gerakan Koperasi serta fasilitasi bantuan legalitas lembaga bagi 10 koperasi, sosialisasi prinsip pemahaman koperasi, dengan capaian terlaksana kegiatan Sosialisasi 1 kali diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari utusan koperasi binaan dinas koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan Pemahaman Berkoperasi yang sesuai prinsip-prinsip koperasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, dengan capaian berhasilnya mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi tingkat Provinsi (KPRI Amanah, KPRI Setia Lamuru, dan Kopkar Macciccong) serta meningkatnya jumlah koperasi binaan yang berprestasi baik tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan capaian terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap koperasi binaan utamanya koperasi pengelola usaha simpan pinjam (35 Koperasi Binaan), Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP, dengan capaian terlaksana pembinaan dan



penilaian kesehatan bagi koperasi binaan khususnya koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam di wilayah kota dan kecamatan (20 koperasi binaan), Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP, dengan capaian terlaksana pembinaan dan pemantauan administrasi keuangan koperasi dan fasilitasi terhadap koperasi sehat. Pelaksanaan Pelatihan Manajemen akuntansi bagi Koperasi dan pelatihan manajemen Koperasi / KUD yang masing masing mengikutsertakan 25 dan 70 peserta dari gerakan Koperasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman bagi pengurus /pengelola dalam manajemen akuntansi dan manajemen Koperasi / KUD.

g) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tidak terdapat efisiensi anggaran pada sasaran 1 karena dari 4 indikator kinerja pada sasaran 1 yaitu meningkatnya koperasi yang berkualitas terdapat 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja di atas 91 % atau **“sangat Memuaskan”** namun masih ada satu indikator yang masih jauh dari target dibawah 50% atau **“Sangat Rendah”**

h) Permasalahan dan Alternatif Solusi

Capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain luasnya cakupan wilayah binaan koperasi di kabupaten Bone yang tidak sebanding dengan jumlah aparat pembina yang ada dan masih kurangnya, minat masyarakat untuk berkoperasi serta masih kurangnya pemahaman berkoperasi yang benar (sehat) oleh pihak gerakan koperasi sehingga kesadaran masyarakat maupun gerakankoperasi masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan serta diharapkan pula adanya penambahan personil aparat pembina teknis yang memiliki keahlian

dibidang koperasi termasuk penambahan tenaga penyuluh koperasi. Kendaraan Operasional sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Selain itu tidak dipungkiri dengan adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan kegiatan koperasi terhambat termasuk pelaksanaan RAT.

Gambar 3 Dokumentasi kegiatan Pembinaan Koperasi Tahun 2020



B. Sasaran 2: Meningkatnya Pertumbuhan Kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (%)	11,76	11,76 (380-340)/340	100
b.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,86	99,60 (16.307+380) /16.754	99,73
c.	Pertumbuhan Volume Usaha Mikro (Milyar)	695,22	861,21 M	123,87

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil, dengan capaian **Sesuai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 11,76 %, dari target 11,76 % dengan persentase 100% Capaian ini dikategorikan “**Sangat Tinggi**” Pada indikator kinerja utama 2 yaitu Persentase usaha mikro dan kecil, dengan capaian **menghampiri target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 99,60 % dari target 99,86 % dengan persentase 99,6 % Capaian ini dikategorikan “**Sangat Tinggi**” karna capaian di atas 91%. Begitu pula pada indikator kinerja 3 yaitu Pertumbuhan Volume Usaha Mikro, dengan capaian **lebih dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 861,21 M dari target 694,29 M dengan persentase 123,87 % Capaian ini dikategorikan “**Sangat Tinggi**”

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha kecil (%)	8,96	11,47 (340-305) /305	11,76 (380-340)/340
b.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,5	99,50 (14.097+340) / 14.504	99,60 (16.307+380) /16.754
c.	Pertumbuhan Volume Usaha Mikro (Rupiah)	678,834 M	858,627 M	861,21 M

Realisasi Indikator kinerja 1 pada sasaran 2 yaitu Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil pada tahun 2020 mencapai 11,76 %.dari target.11,76 %, mengalami kenaikandari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 0,29 %, sedangkan realisasi indikator kinerja 2 pada sasaran 2 yaitu Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2020 mencapai 99,50 % dari target 99,86 %, tidak mengalami kenaikan dari tahun 2019 (tahun sebelumnya). Kemudian Indikator Kinerja 3 pada sasaran 2 yaitu Pertumbuhan Volume usaha mikro pada tahun 2020 mencapai 861,213 M dari target 695,22 M, mengalami kenaikan dari tahun 2019 (tahun sebelumnya)

c) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian Akhir Renstra
a.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha kecil (%)	11,47 (340-305)/305	13,28
b.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,5 (14.097+340) / 14.504	99,86
c.	Pertumbuhan Volume Usaha Mikro (Rupiah)	861,21 M	698,82 M

1. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil pada tahun 2020 mencapai 11,47 % dan target akhir renstra yang diharapkan adalah 13,28 %, memerlukan peningkatan kinerja sebesar 1,81 %
2. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2020 mencapai 99,60 % dan target akhir renstra yang diharapkan adalah 99,86 %, memerlukan peningkatan kinerja sebesar 0,36 %
3. Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Volume Usaha Mikro pada tahun 2020 mencapai Rp.858,627 M dan target akhir renstra adalah Rp.698,82 M, capain di tahun 2020 telah melebihi target akhir renstra.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil

Berdasarkan tabel 3.9 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya

Pertumbuhan Kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Usaha mikro menjadi usaha kecil adalah sebesar 11,76%. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di tahun 2017 sampai 2020 rata rata sebesar 21,6% setiap tahunnya.

2. Persentase usaha mikro dan kecil

Berdasarkan tabel 3.9 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro dengan indikator kinerja Persentase usaha mikro dan kecil adalah sebesar 99,60 %. Sedangkan persentase capaian dari target RPJMD sebesar 99,6 % sehingga target RPJMD sampai dengan tahun 2020 dapat dicapai.

Masih banyaknya usaha mikro yang belum tersentuh pembinaan sehingga menyebabkan kurang optimalnya kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk usaha dan kegiatan Pengembangan Kebijakan ekonomi Lokal dikarenakan keterbatasan anggaran pembinaan dan faktor kurangnya aparat pembina yang kompeten untuk menjangkau luas wilayah kabupaten bone . Selain itu masih banyaknya produk hukum koperasi dan UKM yang belum tersosialisasi dan belum dipahami oleh masyarakat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

Salah satu faktor yang mendukung pencapaian kinerja di tahun 2020 adalah karena adanya inovasi Klik Galery Pada id yang berfungsi mendukung salah satu tupoksi Dinas Koperasi dan UKM dalam mempromosikan produk usaha mikro melalui online market atau online Galery yang memudahkan masyarakat untuk membeli produk usaha mikro melalui aplikasi facebook dan

juga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro dalam memasarkan dan mempromosikan produknya, selain itu inovasi ini mampu menekan biaya promosi baik dari Dinas Koperasi dan UKM maupun oleh pelaku usaha mikro. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator

3. Pertumbuhan Volume Usaha Mikro

Berdasarkan tabel 3.9 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Pertumbuhan Volume Usaha Mikro mencapai 861,213 M melampaui target yakni 695,22 M di tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan Pendataan UMKM dan kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM sudah terlaksana secara optimal hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya **volume usaha mikro** dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terlihat bahwa mayoritas sasaran 2, indikator kinerjanya menunjukkan pencapaian yang sama yaitu lebih dari 91 %, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 2 Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro dengan indikator Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Begitupun untuk indikator kinerja Pertumbuhan volume usaha mikro, telah mencapai kinerja sebanyak 123,87 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 97,81 % dari total anggaran yang telah dialokasikan. Banyaknya indikator sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih

jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	45.865.000	45.865.000	100 %
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	150.825.000	146.530.000	97,15 %

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase Pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro, kecil Dan Menengah	24.500.000	24.500.000	100
		Pendataan UMKM	65.800.000	65.800.000	100 %
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Pengembangan Kebijakan dan Program pengembanagan Ekonomi Lokal	0	0	0
		Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro, Kecil dan Menengah	60.525.000	56.230.000	92,90 %



3.	Pertumbuhan volume usaha Mikro	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	45.865.000	45.865.000	100%
----	--------------------------------	---	------------	------------	------

1) Persentase Pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil

Program dari sasaran 2 adalah Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan persentase peningkatan kualitas dan produktifitas usaha mikro kecil menengah. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas yaitu Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil yang dicapai dengan capaian sebesar 100 %. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 90.300.000,- realisasi sebesar Rp. 90.300.000,- atau 100 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di beberapa kecamatan dengan capaian tersedianya Dokumen hasil pembinaan dan pemantauan 120 WUB serta Kegiatan Pendataan UMKM dengan capaian Dokumen hasil pendataan 1800 Usaha Mikro pertahun.

2) Persentase Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Indikator Kinerja ke dua dari sasaran 2 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas yaitu Persentase Usaha Mikro dan kecil yang dicapai dengan capaian sebesar 99,73 %. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 60.252.000,- realisasi sebesar Rp.56.230.000,- atau 92,90 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal (mengalami refocusing



penanggulangan Covid-19) serta Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mengikutkan pengrajin dan pelaku usaha mikro mengikuti pameran BI di Makassar.

3) Pertumbuhan Volume Usaha Mikro

Indikator Kinerja ke tiga dari sasaran 2 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas yaitu Pertumbuhan volume usaha Mikro yang dicapai dengan capaian sebesar 123,87 %. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.45.865.000,- realisasi sebesar Rp. 45.865.000,- atau 100 % dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan, dengan capaian terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 90 usaha mikro di kecamatan Kajuara, Tonra dan Tanete Riattang.

g) Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 2 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain masih kurangnya akses pasar bagi pelaku usaha mikro dan serta luasnya cakupan wilayah binaan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Bone yang tidak sebanding dengan jumlah aparat pembina yang ada serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung di lapangan sehingga diperlukan alternatif lain dalam pemasaran produk UKM misalnya dengan mamaksimalkan pemanfaatan IT dalam pemasaran produk UKM dan masih perlunya dilakukan kegiatan pelatihan - pelatihan secara berkelanjutan serta diharapkan pula adanya penambahan personil aparat pembina teknis termasuk penambahan tenaga pendamping UKM.



Gambar 4 Dokumentasi kegiatan Pembinaan UKM Tahun 2020



C. Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro

a) Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 3*

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B (69,82)	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP, dengan capaian ***sesuai target*** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai Predikat B, dari target Predikat B dengan persentase 100 %. Capaian ini dikategorikan “***Sangat Tinggi***”

Untuk memperoleh nilai SAKIP, yaitu melalui laporan hasil penilaian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dengan formulasi Perhitungan sebagai berikut:

$$(A \times 0,35) + (B \times 0,20) + (C \times 0,15) + (D \times 0,10) + (E \times 0,20)$$

Keterangan

A = Perencanaan Kinerja

B = Pengukuran Kinerja

C = Pelaporan Kinerja

D = Evaluasi Kinerja

E = Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kab. Bone tahun 2020 atas Implementasi SAKIP tahun 2019 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kab. Bone, diperoleh hasil evaluasi Dengan nilai **69,82** atau kategori “**B**”, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.16 Nilai Hasil Evaluasi

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2019
a	Perencanaan Kinerja	30	24,72
b	Pengukuran Kinerja	25	16,63
c	Pelaporan Kinerja	15	11,51
d	Evaluasi Internal	10	3,11
e	Capaian Kinerja	20	11,85
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,82
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.17 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	C	B	B

Realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP pada tahun 2020 mencapai predikat B dari target predikat B yang diharapkan, mengalami peningkatan dari tahun 2017 (dua tahun sebelumnya) dengan predikat C sebesar 28,56 %.

c) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Renstra Sasaran 3.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Target Akhir Renstra
a.	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	A

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP pada tahun 2020 mencapai B dan target akhir renstra yang diharapkan adalah A, memerlukan peningkatan kinerja sebesar 28 %

d) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi 5 program dan 15 kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP yang dinilai cukup optimal sehingga hasil evaluasi SAKIP oleh APIP di tahun 2020 mencapai predikat nilai B seperti yang diharapkan, Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP dari tahun 2017 sampai tahun 2020

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terlihat bahwa sasaran 3, menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Untuk sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dengan indikator nilai



evaluasi SAKIP oleh APIP, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 98,90% dari total anggaran yang dialokasikan. Besarnya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	422.834.800	420.787.256	99,52
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.150.900	78.708.561	95,81
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.550.000	25.550.000	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	45.767.000	44.670.192	97,60
5	Program Penunjang Pemerintahan Umum	70.750.000	70.230.000	99,27



f) Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.20 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000	86.804.975	98,64
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	99.076.800	98.576.800	99,50
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.000.000	3.000.000	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.970.000	99,40
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	157.833.000	157.510.481	99,80
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	69.925.000	69.925.000	100,00
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27.000.000	27.000.000	100,00
		Pengadaan Mebeleur	0	0	0
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	10.293.500	10.099.500	98,12



		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	44.857.400	41.609.061	92,76
		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-Undangan	25.550.000	25.550.000	100,00
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.767.000	44.670.192	97,60
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	40.250.000	40.250.000	100,00
		Pengelolaan Webiste Perangkat Dearah	30.500.000	29.980.000	98,30

Program yang mendukung sasaran ini ada 5 yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Penunjang Pemerintahan Umum dimana tujuan dari program ini adalah untuk mendukung ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur, mendukung peningkatan ketersediaan aparat pembina yang bersertifikat, mendukung ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu serta peningkatan realisasi kegiatan yang menunjang pemerintahan umum. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas yaitu Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP yang dicapai dengan capaian sebesar 100 %.Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 647.052.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 639.946.009,- atau 98,90% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.834.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 420.787.256,- atau 99,52 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, dengan capaian terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (1 tahun)
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan capaian terbayar jasa keuangan tenaga administrasi / operator/ petugas kebersihan selama 1 tahun
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan capaian terbayar jasa service alat elektronik selama 1 tahun.
- 4) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian terbayar belanja surat kabar / majalah dan bahan bacaan selama 1 tahun.
- 5) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, dengan capaian terbayar Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak Dan Penggandaan dan Belanja Makanan dan minuman harian pegawai selama 1 tahun.
- 6) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan capaian terbayar belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 Thn.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.150.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.78.708.561,- atau 95,81 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, mengalami refocusing anggaran penanggulangan wabah Covid-19).



- 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian pengadaan perlengkapan gedung kantor (1 Unit laptop dan 1 Unit Printer).
- 3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur mengalami refocusing anggara penanggulangan wabah Covid-19).
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan capaian terbayar belanja bahan/material bangunan untuk pemeliharaan Kantor Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional, dengan capaian belanja perawatan kendaran dinas (Belanja penggantian suku cadang, belanja BBM/pelumas, belanja STNK).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.550.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.550.000,- atau 100 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian mengikutkan 4 orang aparat dalam kegiatan Diklat analisa Laporan Keuangan di Makassar dan 2 orang Bimbingan teknis penyusunan LPPD/LKjIP di Jogja.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.767.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.44.670.192,- atau 97,60 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kenerja SKPD, dengan capaian tersusunnya 1 Dokumen laporan

capaian kinerja dan keuangan (Bulanan, Semester dan tahunan) tepat waktu.

5. Program Penunjang Pemerintahan Umum,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.70.230.000,- atau 99,27 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah, dengan capaian tersusunnya 1 Dokumen Renstra SKPD, Renja / renja Perubahan, RKA,DPA,DPPA, tersedia tepat waktu.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah, dengan capaian terlaksana pemeliharaan website Diskop selama 1 tahun (website : dinkopukmbone.com)

g) Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 3 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lingkup instansi antara lain masih kurangnya komitmen para pejabat khususnya eselon IV dan III dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum menjadi proiritas dalam pelaksanaan tupoksi masing masing aparat dan adanya keterbatasan kapabilitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja dilingkup instansi pemerintahan sehingga masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan pelatihan – pelatihan berkelanjutan dan perlunya pengetahuan dalam hal pemanfaatan IT sebagai alternatif dalam mendukung pelaksanaan kinerja aparat serta diharapkan pula adanya penambahan personil aparat pembina teknis yang memiliki keahlian teknis.



3.3 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.337.743.433,- (95,54%)

Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.176.782.424,- (93,83%)
- Belanja Langsung Rp. 1.160.961.009,- (98,91%)

Jumlah	Rp. 3.337.743.433,- (95,54%)
--------	------------------------------

2. Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Koperasi dan UKM dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.176.782.424,- yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp.1.434.986.908,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 741.795.516,-

b) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.160.961.009,- dengan jumlah 8 program dan 30 kegiatan.

3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

a. Penghargaan yang diterima

Melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

dengan Kegiatan Pembinaan , Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi yang indikator kinerjanya adalah tercapainya koperasi berprestasi tingkat nasional maupun provinsi berhasil mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi di tahun 2020, yaitu :

- KPRI AMANAH
- KPRI SETIA LAMURU
- KOPKAR MACINNONG

Gambar 5 Dokumentasi kegiatan Penghargaan Koperasi berprestasi Tahun 2020



4. Capaian kinerja strategis lainnya

Terkait dengan perubahan indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Bone (Perbub Nomor : 87 Tahun.2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemetintah kabupatenBone) didalamnya terdapat perubahan Indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone.

Indikator kinerja utama (IKU) tersebut, hingga tahun 2020 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21 perubahan IKU tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	Persen	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi sehat})}{(\text{Jumlah koperasi aktif})} \times 100\%$ Tipe penghitungan : Komulatif	Rekap hasil Instrumen Penilaian Koperasi sehat (data Bidang Kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi)
Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Persen	$\frac{(\text{Jumlah usaha kecil } T_n - T_b)}{(\text{Usaha kecil } T_b)} \times 100\%$ Tipe perhitungan : komulatif	Rekap laporan data UKM (ODS)
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	$\frac{(\text{Jumlah usaha mikro dan kecil})}{(\text{Jumlah Seluruh Usaha Mikro Dan Kecil})} \times 100\%$ Tipe perhitungan : komulatif	Rekap laporan data UKM (ODS)

5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi dan UKM tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat dan rendahnya minat pengurus koperasi dalam mendukung kelancaran kegiatan yang membutuhkan tenaga teknis sebagai pengelola yang profesional.
2. Terbatasnya aparat pembina Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah dalam menjangkau luas wilayah.
3. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berkoperasi dan masih kurangnya pemahaman berkoperasi yang benar (sehat) oleh pihak gerakan koperasi.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan dan pemantauan / pembinaan koperasi dan usaha mikro
5. Masih adanya produk hukum koperasi dan UKM yang belum tersosialisasikan

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM
2. Diharapkan adanya penambahan Personil dari aparat Pembina (PNS) yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya.
3. Untuk mendukung kelancaran kegiatan diperlukan adanya peningkatan pembinaan/pelatihan (Bimtek) kepada aparat pembina serta pengurus koperasi serta pelaku usaha mikro / wirausaha baru
4. Perlunya dilakukan pembinaan, pengawasan dan pendataan ulang yang akurat terhadap lembaga Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.



BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Dinas Koperasi Dan UKM juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dan UKM. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi Dan UKM pada tahun 2020 adalah **baik**, karena terdapat 7 indikator memenuhi kriteria Sangat tinggi dan 1 indikator memenuhi kriteria Sangat Rendah.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan



program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk Galery Online / Online Market. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Koperasi Dan UKM ke depan antara lain tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan UKM dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan UKM, Usaha koperasi dan UKM menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta Kreativitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Koperasi Dan UKM untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H.BAHARUDDIN,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : DR.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,M.Si

Jabatan : Bupati Bone

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



DR.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si



Watampone, 02 Januari 2020

PIHAK PERTAMA

Ir.H.BAHARUDDIN, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

INSTANSI : DINAS KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BONE

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	<i>Persentase Koperasi sehat</i>	Persen	64
		Persentase koperasi aktif	Persen	34,50
		Jumlah Koperasi berprestasi	Koperasi	3
		Pertumbuhan Volume Usaha koperasi	Rupiah	248,71 M
2.	Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	<i>Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil</i>	Persen	11,76
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99,86
		Pertumbuhan volume usaha mikro	Rupiah	695,22
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B

Program

Anggaran

1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 425.326.800,-
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 132.525.900,-
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 70.000.000,-
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	Rp. 37.200.000,-
5	Kewangan	
	Penunjang Pemerintah Umum	Rp. 80.750.000,-
6	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 51.500.000,-
7	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 272.550.000,-
8	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rp. 745.147.300,-

Watampone, 02 Januari 2020



KABUPATEN BONE

(DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANG, M.Si)



KEPALA DINAS

(H. HARAHARUDDIN, M.Si)





Lampiran 2 Koperasi Berprestasi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Urip Sumiharjo No. 209 Telp. (0411) 453194 Fax. 453489
Makassar - 90231

Makassar 19 Desember 2020

Nomor : 518-06/9009/DK-UKM
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberian Piagam dan Penyerahan
BPUM

Kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi & UKM Se-Sulsel
2. Daftar Terlampir
3. Ketua DEKOPINWIL Prov. Sulsel
di -

TEMPAT

Dalam rangkaian pelaksanaan hari koperasi dan hari UMKM yang dilaksanakan setiap tahun di Kab/Kota, berhubung karena adanya pandemic Covid-19 sehingga acara tersebut baru dapat dilaksanakan. Untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu (daftar terlampir) untuk dapat hadir pada acara :

1. Penyerahan piagam penghargaan koperasi berprestasi dan tokoh koperasi.
2. Penyerahan secara simbolis bantuan Presiden Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/17 Desember 2020
Waktu : 08.30 WITA
Tempat : Hotel Ibis Makassar City Center
Jl. Maipa No. 8

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

AN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

DR. ABDUL HAYAT M.Si
Pembina Utama
NIP. 19650405 199010 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan)
2. Peringgal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

Nomor : 518-06/9009/DK-UKM

NO	NAMA KOPERASI	TOKOH KOPERASI
1	KPRI Sanita Lepas Perempuan (Kab. Gowa)	Zakaria Mangenda, Bsc (Kab. Enrekang)
2	Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Makassar (Kab. Pinrang)	Dahsan Damis, S.Pd. M.Pd (Kab. Sidrap)
3	Prinkoppol Maros (Kab. Maros)	Dr. Ir. Samsu A. Gaffar, MM (Kab. Pangkep)
4	KPRI Sahabat (Kab. Bantaeng)	Dra. Agustini Ummyati Djaya (Kab. Pangkep)
5	KSU. Taqwa (Kab. Bantaeng)	
6	KPRI Setia Lamuru (Kab. Bone)	
7	KPRI Amanah (Kab. Bone)	
8	Kopkar Macinnong PGB Arasoe (Kab. Bone)	
9	KPRI Asri Rutan Rappang (Kab. Sidrap)	
10	KUD Singki (Kab. Enrekang)	





Lampiran 3 Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

REKAPITULASI LAPORAN HASIL EVALUASI INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2020
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2019
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE

No.	Organisasi Perangkat Daerah / Kecamatan	Predikat	Nilai	Nilai Per Elemen					Ketua Tim	Rekap Predikat				
				Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Kinerja		BB	B	CC	C	D
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)														
1	Inspektorat Daerah	BB	73,46	25,14	15,31	13,2	3,54	16,27	Muhammad Yahya S.E	1				
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BB	71,18	25,48	15,31	13,61	3,3	13,48	Rosnatang, S.E., M.Si.	1				
3	Badan Pendapatan Daerah	BB	70,6	24,86	14,69	10,57	4,25	16,23	A. Yusran Sawedi., SE., M.Si	1				
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	69,82	24,72	15,63	11,51	3,11	14,85	Muhammad Yahya		1			
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	69,82	24	14,69	10,78	6,53	13,82	Abd. Rahman Sarji., ST., M.Si		1			
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	69,72	23,83	17,19	10,3	4,59	13,81	Abd. Rahman Sarji., ST., M.Si		1			
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	69,61	23,53	16,56	10,78	4,89	13,85	A. Yusran Sawedi., SE., M.Si		1			
8	Dinas Ketenagakerjaan	B	69,6	26,04	13,13	11,52	4,16	14,75	A. Yusran Sawedi., SE., M.Si		1			
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	B	69,5	24,01	17,19	10,78	6,13	11,39	Hj. Habsiah., S.Sos., MM		1			
10	Dinas Lingkungan Hidup	B	68,72	23,98	15,63	10,78	4,65	13,68	Hj. Habsiah., S.Sos., MM		1			
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	68,55	23,68	10,94	9,85	6,85	17,23	A. Sohras Sam, S.P., M.Si.		1			
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	B	68,39	23,86	15,94	8,87	4,78	14,94	Rosnatang, S.E., M.Si.		1			
13	BLUD Rumah Sakit Tenriawaru (UPTD Dinas Kesehatan Prov)	B	67,77	24,11	15,31	10,15	6,02	12,18	Rosnatang, S.E., M.Si.		1			
14	Dinas Kebudayaan	B	67,36	25,82	12,19	10,98	4,37	14	A. Yusran Sawedi., SE., M.Si		1			
15	Dinas Kesehatan	B	67,37	20,78	15,63	10,78	6,68	13,5	Hj. Habsiah., S.Sos., MM		1			
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	67,06	22,3	11,24	9,7	5,82	18	A. Sohras Sam, S.P., M.Si.		1			
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	B	66,1	25,06	18,75	8,72	2,24	11,33	A. Sohras Sam, S.P., M.Si.		1			
18	Dinas Pariwisata	B	65,99	23,16	15,63	10,22	5,05	11,93	Abd. Rahman Sarji., ST., M.Si		1			

No.	Organisasi Perangkat Daerah / Kecamatan	Predikat	Nilai	Nilai Per Elemen					Ketua Tim	Rekap Predikat				
				Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Kinerja		BB	B	CC	C	D
19	Dinas Sosial	B	65,61	21,39	13,44	10,78	6,05	13,95	Rosnatang, S.E., M.Si.		1			
20	Dinas Ketahanan Pangan	B	65,48	21,23	13,44	10,78	6,05	13,98	Hj. Habsiah., S.Sos., MM		1			
21	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	B	65,35	23,48	16,88	8,48	1,93	14,58	Yulita., ST., M.Si.		1			
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	65,15	23,16	15,31	10,23	3,55	12,9	Abd. Rahman Sarji., ST., M.Si		1			
23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	B	64,81	19,14	15,31	11,09	3,6	15,67	Yulita., ST., M.Si.		1			
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	B	64,28	22,92	15,93	10,54	3,47	11,42	Yulita., ST., M.Si.		1			
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	63,84	21,94	14,38	9,11	5,04	13,37	Abd. Rahman Sarji., ST., M.Si		1			
26	Dinas Perdagangan	B	63,62	22,81	12,5	11,86	3,27	13,18	Mujtaba., S.Sos., MH		1			
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	63,62	23,27	15,31	10,97	0,4	13,67	Muhammad Yahya		1			
28	Dinas Perindustrian	B	63,47	23,13	15,31	9,05	1,52	14,46	Hj. Habsiah., S.Sos., MM		1			
29	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B	63,31	24,5	15,62	11,32	0,4	11,47	Muhammad Yahya		1			
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	61,99	22,99	13,44	8,37	1,56	15,63	Mujtaba., S.Sos., MH		1			
31	Satuan Polisi Pamong Praja	B	61,56	22	13,13	9,28	3,82	13,33	A. Yusran Sawedi., SE., M.Si		1			
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	61,24	22,98	15	10,03	1,47	11,76	A. Sohras Sam, S.P., M.Si.		1			
33	Dinas Peternakan	B	61,22	21,7	12,5	9,47	4,55	13	Muhammad Yahya S.E		1			
34	Dinas Perhubungan	B	60,38	20,6	15,62	10,22	1,23	12,71	Rosnatang, S.E., M.Si.		1			
35	Sekretariat DPRD	CC	57,54	21,15	13,44	8,12	1,83	13	Yulita., ST., M.Si.			1		
36	Sekretariat Daerah	CC	55,58	21,82	12,19	12,93	1,75	6,89	Mujtaba., S.Sos., MH			1		
37	Dinas Pemadam Kebakaran	CC	54,45	21,83	12,5	8,65	0,4	11,07	Mujtaba., S.Sos., MH			1		
38	Dinas Pendidikan	CC	50,77	20,75	11,56	11,66	1,72	5,08	A. Sohras Sam, S.P., M.Si.			1		
39	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	C	45,8	17,21	9,37	12,18	1,34	5,7	Mujtaba., S.Sos., MH				1	
Rekap Per Predikat										3	31	4	1	0
TOTAL										39				

